

Membangun Masyarakat Secara Otentik

Dalam kehidupan sehari-hari, ada sejumlah kebenaran sederhana yang biasa disebut sebagai “truisme”. Untuk mengetahui kebenaran suatu truisme, seseorang tidak usah berpikir terlalu jauh dengan menggunakan cara yang canggih dan bertakik-takik. Dengan akal sehat biasa yang dipunyai oleh semua orang yang waras, maka suatu truisme bisa dimengerti oleh setiap orang. Siapakah yang tak tahu bahwa setiap tindakan yang membawa kemaslahatan buat orang banyak adalah suatu kebajikan? Siapa yang tak tahu bahwa menghormati orang tua adalah kebaikan yang dipujikan oleh siapa saja? Seringkali kehidupan seseorang dalam kesehariannya dituntun oleh bentuk-bentuk kebenaran sederhana yang sangat praktis sifatnya: kebenaran yang “primitif” dan tak usah dibuktikan, karena telah membuktikan kebenarannya sendiri. Truisme bagi setiap orang seperti sebuah “kompas” yang mengarahkan setiap tindakan-tindakannya. Dengan suatu truisme itu, seseorang akan bertindak dalam cara yang utuh dan padu dan membangun suatu komunitas yang bermakna.

Setelah perubahan-perubahan baru yang kita alami semenjak pergantian rezim tahun yang lalu, sejumlah hal baru muncul ke permukaan. Tujuan-tujuan baru juga mulai dirumuskan, dan masyarakat seperti memasuki sejenis “kesadaran” atau “sensibilitas” yang sama sekali lain bentuknya. Masyarakat, pelan-pelan, mulai tahu bahwa

lembaga negara yang terlalu kuat seperti kita saksikan pada masa-masa yang lalu ternyata membawa banyak bencana dan malapetaka. Memberikan mandat yang terlalu besar kepada negara tanpa adanya kekuatan lain yang mengimbangnya akan membawa resiko yang tidak kecil. Oleh karena itu, pelan-pelan masyarakat mulai sadar bahwa kebaikan hidup mereka tidak seluruhnya bisa ditentukan oleh negara. “Kebaikan hidup” adalah tujuan yang bisa dirumuskan dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat tanpa pengarahan yang “cerewet” dari institusi negara atau yang lain. Setiap orang berhak untuk “membentuk” kebaikan hidupnya sendiri, tentu tidak secara soliter, tetap dalam interaksi yang dinamis dengan orang-orang lain dalam apa yang kita sebut sebagai “komunitas” atau “jama’ah”. Ini adalah “truisme” yang sudah kita ketahui sejak lama, tetapi hilang dari horison kesadaran orang banyak, karena tertipu oleh indoktrinasi sistem yang lalu bahwa negara tahu yang baik mengenai kehidupan anggota-anggotanya.

Dengan kata lain, tugas ke depan adalah membangun “masyarakat”. Dalam tugas seperti ini, truisme bisa menjadi semacam “modal sosial” yang amat berguna. Bagaimana masyarakat dibentuk, bagaimana bentuk masyarakat yang baik dipersiapkan oleh orang-orang yang tinggal di dalamnya, bagaimana kebahagiaan dalam hidup dimengerti oleh mereka, bagaimana kesejahteraan dipahami oleh anggota-anggota dalam suatu komunitas, bagaimana

hubungan antara individu dan masyarakat didefinisikan oleh mereka: semua tema-tema ini adalah sesuatu yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang sebagai “norma”, sebagai truisme, sebagai kebenaran sederhana yang tidak usah dibuktikan lagi. Jika esensi tindakan “berpolitik” adalah membangun suatu kehidupan yang “baik” buat individu dan masyarakat, membangun suatu kolektivitas yang berdasar pada norma yang menjamin “kebermaknaan” dan “ketertiban”, serta menjamin bahwa hak-hak (juga kewajiban) masing-masing anggota dalam masyarakat bersangkutan terlindungi secara baik, maka truisme yang sudah tumbuh dalam masyarakat selama ini bisa menjadi modal sosial untuk membangun tradisi berpolitik yang “otentik”, yang berjangkar pada norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Artinya, usaha membangun masyarakat tidak merupakan sesuatu yang “asing” karena bersumber dari harapan-harapan yang tumbuh dalam masyarakat sendiri.

Yang patut kita sesalkan adalah bahwa tindakan-tindakan politik dalam sistem demokrasi modern makin menjauhi kehidupan yang nyata dalam dataran pengalaman sehari-hari. Sistem demokrasi yang dilaksanakan dalam negeri kita malah memperlihatkan kelemahan yang makin kronis karena ketidaksempurnaan dalam penerapannya dan kegagalannya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan standar dalam sistem itu sebagaimana dipraktekkan di negeri demokratis lain yang sudah “mapan”. Cacat paling pokok dalam sistem demokrasi modern adalah disebabkan oleh

sifat yang dilekatkan padanya, yaitu demokrasi “perwakilan”. Memang, dengan makin rumitnya susunan-susunan masyarakat dalam tahap perkembangan modern sekarang ini, cita-cita kuno mengenai “demokrasi” sebagai pemerintahan oleh rakyat secara langsung makin tidak mungkin secara praktis. Pada akhirnya, pemerintahan oleh rakyat haruslah diwujudkan dalam bentuk ‘demokrasi perwakilan’. Artinya, kedaulatan rakyat tidak bisa diselenggarakan secara langsung, tetapi melalui suatu “lembaga mediasi” yang disebut parlemen. Tapi, justru di sinilah letak soalnya.

Jika suatu kedaulatan harus dilaksanakan melalui “perantara” yang namanya “wakil rakyat”, maka problem perennial yang akan selalu kita hadapi adalah, siapa yang bisa menjamin bahwa lembaga perantara ini tidak akan bekerja untuk kepentingan-kepentingannya sendiri, dan makin jauh dari masyarakat banyak yang memberinya mandat. Dengan kata lain, jika mandat didelegasikan kepada pihak lain, apa yang menjamin bahwa mandat itu tidak diselewengkan. Jika suatu ide tentang “membangun masyarakat” sebagai esensi dari tindakan berpolitik “disubkontrakkan” kepada lembaga perantara yang bernama parlemen, siapa yang menjamin bahwa kepentingan-kepentingan “di luar” masyarakat lebih banyak bekerja dan mempengaruhi ketimbang kepentingan masyarakat sendiri. Dengan kata lain, pelan-pelan kita makin sadar bahwa demokrasi perwakilan membawa bahaya “alienasi” atau keterasingan. Masyarakat yang memberikan mandat kepada wakil-wakilnya makin tidak tahu apa yang diperbuat oleh wakil-wakil

mereka itu. Segala urusan yang berlangsung dalam “gedung parlemen” seperti barang aneh yang tidak langsung berhubungan dengan kehidupan yang nyata.

Pada akhirnya, suatu tindakan politik haruslah bersifat “praktis”. Dari situlah timbul julukan “politik praktis”. Julukan ini sudah lama menjadi cibiran. “Anda terjebak dalam politik praktis,” kata seorang anak muda kepada anggota DPRD dengan nada sinis. Mungkin ada keterangan sosiologis tersendiri, kenapa julukan “politik praktis” menjadi bernada sinis seperti itu. Tetapi, politik pada akhirnya haruslah praktis, dalam pengertian berhubungan dengan tindakan-tindakan kongkrit untuk mengatasi masalah kongkrit yang dihadapi oleh masyarakat. Sifat praktis inilah yang mulai hilang dari paktek-praktek politik dalam demokrasi perwakilan. Contoh-contoh nyata makin banyak kita temukan dalam parlemen kita sekarang, di mana sering kita temui suatu “tindak politik” yang jauh dari kebutuhan masyarakat banyak, makin abstrak dan sulit dipahami oleh konstituen. Lembaga perwakilan bisa terjerembab ke dalam “labirin” kepentingannya sendiri, dan dengan demikian kian lama kian terasing dari masyarakat yang diwakilinya. Masyarakat makin bersikap “sinis” terhadap lembaga ini, karena tidak adanya hubungan yang nyata antara apa yang berlangsung di lembaga itu dengan kenyataan-kenyataan kongkret di masyarakat. Tindakan berpolitik di lembaga itu juga makin jauh dari “truisme” atau kebenaran-kebenaran sederhana yang hidup dan menghunjam dalam kesadaran masyarakat. Apa yang benar dan baik dalam pengertian yang sederhana sebagaimana

dipahami oleh masyarakat makin sulit digunakan sebagai alat untuk “membaca” tindakan-tindakan berpolitik yang berlangsung dalam lembaga perwakilan. Apakah ada hukum kebenaran tersendiri yang berlaku buat kaum “politisi”, dan tidak berlaku buat golongan awam yang lain? Apakah mereka mempunyai “truisme”-nya sendiri?

Bahaya yang kita hadapi dari sistem demokrasi modern adalah jika sistem itu makin tidak “responsif” terhadap sesuatu yang nyata. Bahaya akan datang jika sistem ini menjadi sebuah “pulau” yang terisolir dari dinamik yang berkembang di sekitarnya, ibarat sebuah “teks” yang tertutup dan tak berkait dengan denyut kehidupan yang kongkrit. Bahaya akan muncul jika sistem tersebut ternyata tidak berhubungan dengan upaya “membangun masyarakat” berdasarkan kebenaran-kebenaran sederhana yang hidup dalam kehidupan sehari-hari orang ramai. Yang lebih berbahaya lagi jika demokrasi berkembang dalam arah yang pernah digambarkan dengan baik sekali oleh filsuf politik dari Italia, Niccolo Machiavelli. Dalam penggambaran Machiavelli, tindakan berpolitik tak lebih dari “taktik” dan siasat bagaimana suatu kekuasaan bisa dipertahankan, dengan menggunakan hukum-hukum objektif yang berlaku buat kekuasaan itu sendiri. Machiavelli seolah ingin mengatakan bahwa “moral politik” hanya cukup dicari dari dalam tindakan politik itu sendiri, dan tidak ada sesuatu dari “luar politik” bisa menjadi bahan penilaian untuk tindakan berpolitik. Atau istilah “moral politik” itu tidak tepat digunakan dalam hal ini, karena bagi Machiavelli, boleh jadi kata “moral” itu

adalah sesuatu yang bersifat “eksternal” terhadap politik itu sendiri. Demokrasi perwakilan bisa terjebak dalam kecenderungan yang semacam ini. Semakin jauh suatu lembaga perwakilan dari kehidupan nyata dalam masyarakat, maka lembaga itu makin sulit dinilai berdasarkan “truisme” dan “moral” yang berkembang dalam masyarakat. Lembaga itu bisa bergerak secara otonom, persis seperti sebuah “struktur” dalam pengertian para penganut mazhab strukturalisme dari Perancis.

Bagaimana mengembalikan tindakan-tindakan politik yang “rumit” dan abstrak dalam demokrasi perwakilan modern kepada sesuatu yang nyata, kepada esensi dari tindakan politik itu sendiri, yaitu membangun kehidupan yang baik buat orang ramai? Bagaimana tujuan-tujuan

yang sederhana dan mudah dijangkau oleh masyarakat banyak harus menjadi “nilai penuntun” dalam praktik berpolitik? Bagaimana “kehidupan sehari-hari” bisa dengan mudah dihubungkan dengan segala tindakan politik pada tingkat yang lebih tinggi?

Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu kita sekarang ini, saat tema “masyarakat” kembali hidup dalam wacana politik. Sekali lagi, “masyarakat” sebagai entitas yang kongkrit, bukan abstraksi teoritis yang mengaburkan individu-individu yang kongkrit dan hidup di dalamnya. Membangun suatu tindakan politik yang otentik, saya kira harus bermula dari kehidupan nyata yang sederhana, dari truisme sehari-hari. ❖

(Ulil Abshar-Abdalla)